

BAB I

PENDAHULUAN

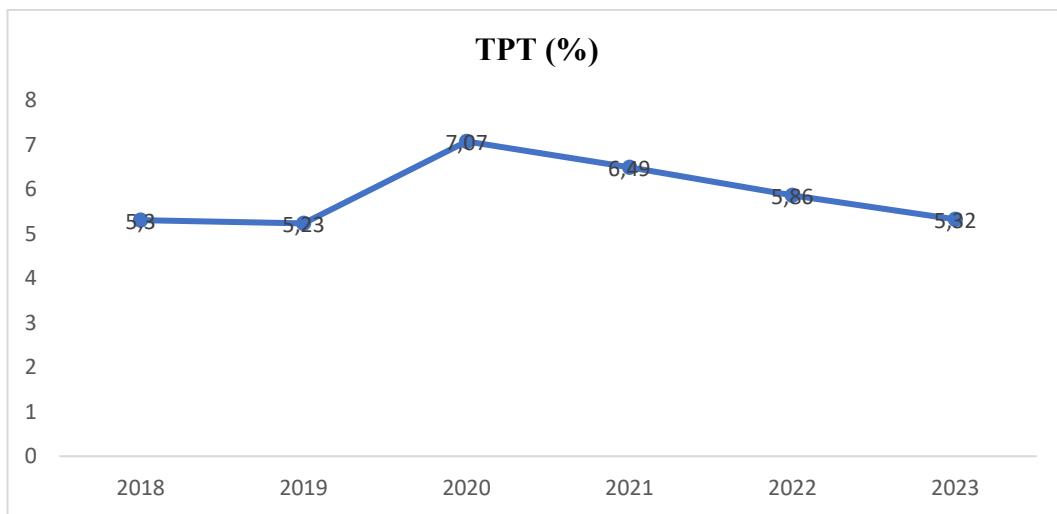
1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan salah satu tantangan serius yang harus diatasi oleh suatu negara atau daerah. Kondisi ini muncul akibat tingginya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sementara pertumbuhannya terus meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Meskipun tingginya jumlah tenaga kerja seharusnya diiringi dengan peluang kerja yang cukup, kenyataannya, jumlah lowongan yang tersedia masih jauh dari kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dalam angkatan kerja memiliki dampak signifikan terhadap individu yang akan memasuki dunia kerja serta terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi mereka (Harahap *et al*, 2023).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan suatu negara. TPT mencerminkan persentase jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja terhadap total angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut Todaro dan Smith (2021), pengangguran yang tinggi dapat menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Selain faktor ketidak seimbangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan, masalah lain yang berkontribusi terhadap pengangguran terbuka adalah

rendahnya keterampilan tenaga kerja. Menurut Mankiw (2018), rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja mengakibatkan banyak pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Akibatnya, banyak lulusan baru yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Hal ini semakin diperparah oleh perubahan teknologi dan digitalisasi yang menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang lebih kompleks dan adaptif.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan data di atas menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023 akibat berbagai faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,23%, namun, pada tahun 2020 mengalami lonjakan signifikan dimana tingkat pengangguran menjadi 7,07% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas, PHK massal, dan berkurangnya kesempatan kerja. Memasuki tahun 2021 hingga 2023

tingkat penagngguran tingkat pengangguran mengalami penuruan menjadi 5,32%, disebabkan oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya lapangan kerja di sektor formal, serta kenaikan upah buruh. Pemulihan ekonomi mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, jumlah pekerja informal menurun, menunjukkan peralihan tenaga kerja ke sektor formal yang lebih stabil (BPS, 2023). Rata-rata upah buruh yang meningkat dari Rp3,07 juta pada 2022 menjadi Rp3,18 juta pada 2023 juga menjadi faktor yang menarik lebih banyak orang ke pasar kerja. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan secara signifikan selama periode tersebut (BPS, 2023).

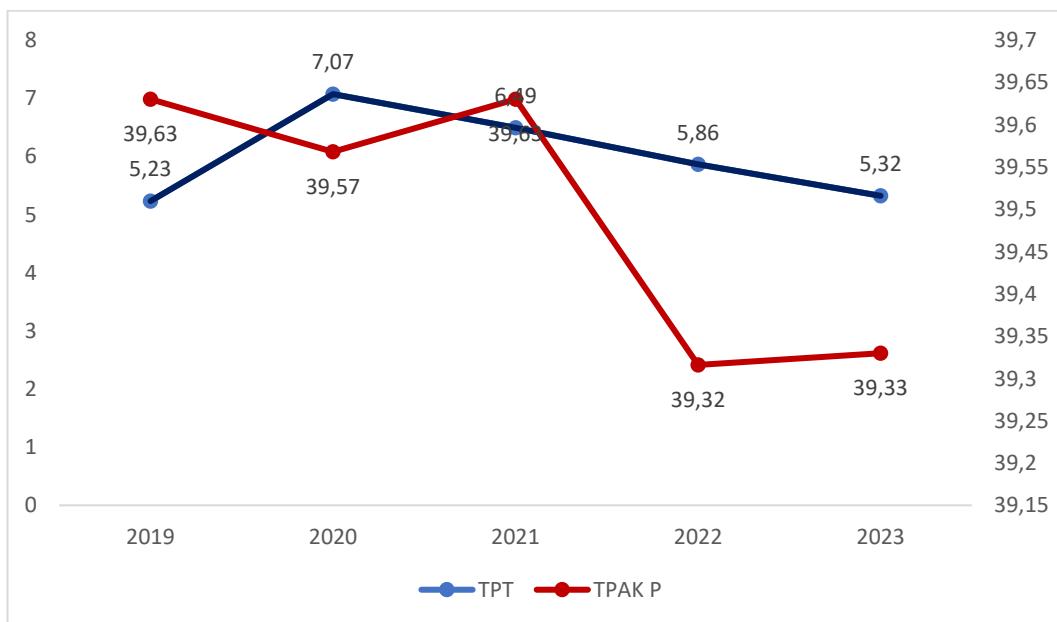
Dampak dari tingkat pengangguran terbuka yang tinggi sangat luas, mulai dari peningkatan angka kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat, hingga melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut *International Labour Organization* (2022), negara yang memiliki tingkat pengangguran tinggi cenderung mengalami penurunan kesejahteraan sosial yang signifikan karena berkurangnya pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, penciptaan kebijakan investasi yang mendukung pertumbuhan industri, serta penguatan sektor kewirausahaan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Dalam kondisi saat ini, tidak ada perbedaan gender dalam hal memperoleh pekerjaan tetap, yang berarti bahwa perempuan juga memiliki kesempatan untuk bekerja dan menikmati pekerjaan mereka sebagaimana laki-laki. Namun, di

Indonesia, masih terdapat pandangan yang mengakar bahwa perempuan tidak dianjurkan untuk bekerja seperti laki-laki dan lebih baik berfokus pada urusan rumah tangga daripada mencari nafkah. Pandangan ini masih umum ditemukan di berbagai keluarga dan sering menjadi topik perdebatan. Isu kesetaraan gender tetap menjadi perbincangan yang terus berlanjut di Indonesia, di mana berbagai stigma terhadap perempuan masih banyak diyakini oleh masyarakat. Salah satu stigma yang berkembang adalah pandangan bahwa perempuan seharusnya tidak perlu mencari pekerjaan. Menurut Sri Mulyani ,Menteri Keuangan (Artha, 2019), masih ada pemikiran bahwa perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga daripada mencari pekerjaan seperti layaknya laki-laki.

Faktor utama yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi angkatan kerja wanita dan tingkat pengangguran terbuka antara lain adalah ketersediaan lapangan kerja, kualitas pendidikan, serta kebijakan ketenagakerjaan. Studi yang lebih baru oleh Barigozzi *et al.* (2025) menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi beban ganda dalam pekerjaan domestik dan profesional, termasuk beban mental yang tidak terlihat, yang berdampak signifikan terhadap partisipasi mereka di sektor formal dan informal. Hal ini sejalan dengan temuan Eissler *et al.* (2022), yang menggarisbawahi rendahnya kontrol perempuan atas penggunaan waktu mereka (*time-use agency*), serta Tas & Ahmed (2021) yang menyoroti bahwa keterbatasan akses terhadap layanan pengasuhan anak menyebabkan perempuan lebih cenderung memilih pekerjaan informal atau tidak berbayar dibandingkan sektor formal.

Selain itu, penelitian oleh Goldin (2019) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan wanita dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tanpa kebijakan yang mendukung, tingginya jumlah angkatan kerja wanita dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran terbuka apabila permintaan tenaga kerja tidak sebanding dengan pasokan tenaga kerja.



Sumber : World Bank, 2025

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja Wanita di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan dari data di atas tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di indonesia pada tahun 2019 mengalami kenaikan 39,63%, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 39,57%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Tahun 2021, angka ini kembali meningkat ke 39,63%, menandakan adanya pemulihan ekonomi. Namun, pada 2022 terjadi lagi penurunan ke 39,32%, Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Indonesia menjadi 39,32% pada tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah beban ganda yang dihadapi oleh

perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Banyak perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan keluarga, sehingga sulit untuk tetap aktif dalam dunia kerja. Hal ini sejalan dengan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) yang menyebutkan bahwa “jam kerja yang panjang serta tugas pengasuhan yang besar menjadi tantangan utama bagi perempuan dalam mempertahankan partisipasi mereka di angkatan kerja”.

Pada tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan meskipun pada tahun yang sama tingkat pengangguran terbuka juga menurun. Kondisi ini bertolak belakang dengan pandangan klasik dalam teori penawaran tenaga kerja yang menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran seharusnya mencerminkan peningkatan permintaan tenaga kerja, yang mendorong lebih banyak individu, termasuk perempuan, untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Namun, menurut laporan *Global Gender Gap Report* (World Economic Forum, 2023) dan data ILO (2023), partisipasi tenaga kerja perempuan secara global belum pulih sepenuhnya ke level pra-pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti beban kerja domestik, akses terhadap layanan pengasuhan anak, dan kondisi kerja yang tidak fleksibel masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia kerja, terlepas dari membaiknya indikator pengangguran.

Meskipun ada berbagai faktor yang mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita, tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan gender dalam hal kesempatan promosi dan

pengembangan karier. Studi dari Blau & Kahn (2017) menunjukkan bahwa meskipun wanita semakin banyak yang bekerja di sektor formal, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mencapai posisi manajerial atau kepemimpinan. Selain itu, beban pekerjaan domestik yang tidak merata sering kali menjadi kendala bagi wanita untuk berkarier lebih jauh. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemberian cuti melahirkan yang lebih fleksibel, akses terhadap fasilitas penitipan anak yang terjangkau, serta program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Nohe *et al.* (2022) menemukan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka, meskipun Indeks Pembangunan Manusia tidak. Putri (2010) menunjukkan bahwa peningkatan TPAK wanita berkontribusi positif terhadap kondisi ekonomi makro, meskipun fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, hal ini relevan sebagai indikator aktivitas angkatan kerja perempuan. Kapsos *et al.* (2019) juga menyoroti perubahan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan, meski dengan konteks yang berbeda, yang berkaitan dengan dinamika ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja. Badria (2021) secara spesifik menemukan bahwa TPAK memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Kesemua penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan, menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat pengangguran.

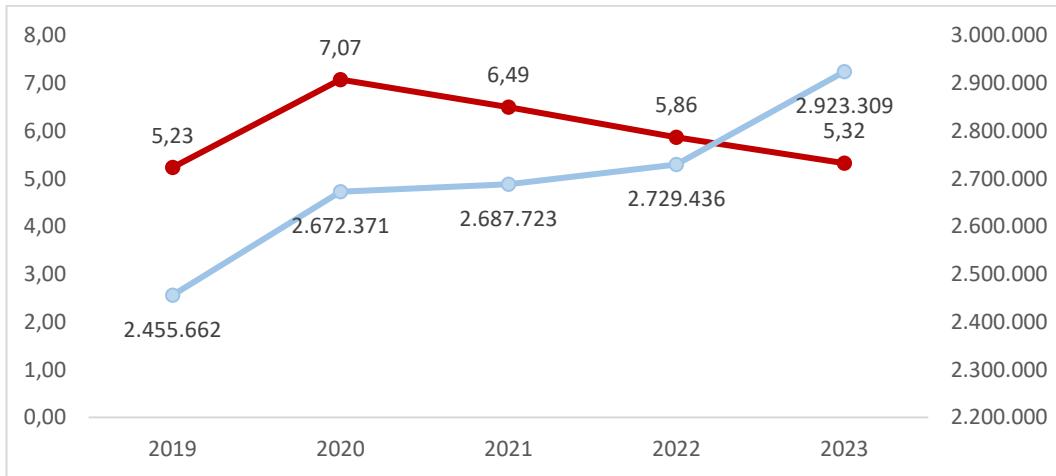
Selain tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, tingkat upah minimum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kalangan wanita. Sebagai contoh, Siregar (2020) dalam studi komprehensif di

Indonesia menemukan bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan lapangan kerja formal dan informal setelah beberapa waktu dengan efek negatif yang lebih besar pada pekerja perempuan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran secara keseluruhan, namun juga menurunkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja.

Namun, kebijakan upah minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengurangan kesempatan kerja, terutama bagi wanita yang bekerja di sektor informal atau dengan keterampilan rendah. Di Indonesia, upah minimum yang bervariasi antar daerah mempengaruhi tingkat partisipasi dan pengangguran wanita secara berbeda-beda. Misalnya, di daerah dengan upah minimum tinggi seperti Jakarta, lebih banyak wanita yang ter dorong untuk bekerja di sektor formal, tetapi di daerah dengan tingkat upah rendah, banyak wanita yang terjebak dalam pekerjaan informal atau bahkan menganggur akibat kurangnya lapangan kerja yang layak.

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dengan menetapkan batas minimal upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, penerapan UMR yang tinggi juga sering kali dikaitkan dengan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kebijakan upah

minimum cenderung meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan pekerja muda dan kurang terampil (Neumark dan Wascher, 2008).



Sumber : World Bank, 2025

Gambar 1.3 Tingkat Penganggura Terbuka dan Tingkat Upah Minimum Regional di indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat terlihat bahwa Upah Minimum

Regional (UMR) diukur dalam rupiah pada periode 2019–2023 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, yaitu dari Rp2.455.662 pada tahun 2019 menjadi Rp2.923.309 pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan adanya kebijakan pemerintah daerah dalam menaikkan standar upah minimum setiap tahun guna melindungi daya beli pekerja dan menyesuaikan inflasi. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 TPT meningkat signifikan menjadi 7,07 persen yang erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan memicu pemutusan hubungan kerja. Namun, setelah tahun 2020, TPT berangsur turun dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun UMR terus meningkat, tingkat pengangguran justru menurun

setelah masa krisis, mengindikasikan adanya perbaikan struktur ekonomi dan kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja pada upah yang lebih tinggi.

Secara teori peningkatan UMR berpotensi menambah beban biaya tenaga kerja dan menekan permintaan tenaga kerja, namun pada periode ini efek tersebut tampak tidak dominan karena faktor pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, kenaikan UMR pada periode penelitian ini dapat dikaitkan dengan tren penurunan TPT setelah tahun 2020, walaupun faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan kebijakan pemulihan pasca-pandemi juga berperan penting.

Dalam ekonomi makro, pengaruh kebijakan UMR terhadap tingkat pengangguran terbuka tidak hanya bergantung pada tingkat upah itu sendiri, tetapi juga pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Jika perekonomian dalam kondisi ekspansif, maka dampak kenaikan upah minimum terhadap pengangguran dapat diminimalisir karena peningkatan daya beli masyarakat akan mendorong permintaan barang dan jasa yang lebih besar (Todaro & Smith, 2021).

Syahputra dan Nurhayati (2019) menemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi di Sumatera. Hal serupa juga disampaikan oleh Badria (2021), yang menyatakan bahwa upah minimum tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor upah minimum cenderung kurang berpengaruh secara langsung terhadap tingkat pengangguran, berbeda dengan TPAK yang memiliki pengaruh lebih nyata. Penelitian ini kemudian mencoba memfokuskan kembali kajian dengan

mempertimbangkan variabel upah minimum bersama TPAK perempuan dalam konteks pengangguran terbuka di Indonesia.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara TPAK, UMR, dan tingkat pengangguran. Nohe *et al.* (2022) menemukan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, namun tidak mengkhususkan pada TPAK perempuan. Penelitian Putri (2010) menunjukkan bahwa TPAK perempuan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan langsung terhadap pengangguran. Kapsos *et al.* (2019) bahkan mengkaji penurunan TPAK perempuan di India akibat perubahan struktural ekonomi, namun tidak membahas hubungan langsung dengan tingkat pengangguran atau UMR. Sementara itu, penelitian Syahputra dan Nurhayati (2019) serta Badria (2021) menemukan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka, namun penelitian-penelitian tersebut tidak membedakan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender.

Berdasarkan hasil studi terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yaitu belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis pengaruh TPAK perempuan dan UMR secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Di samping itu, minimnya fokus terhadap pendekatan berbasis gender dalam studi pengangguran membuat pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkhususkan pada TPAK perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana peran partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kebijakan UMR

memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya dalam konteks wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial ekonomi tersendiri

Berdasarkan permasalahan research gap di atas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi angkatan kerja wanita terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
3. Bagaimana interaksi antara partisipasi angkatan kerja wanita dan upah minimum regional dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi angkatan kerja wanita terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

2. Menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
3. Menganalisis interaksi antara partisipasi angkatan kerja wanita dan upah minimum regional dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Angkatan Kerja Wanita dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
- b. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan bahan referensi dalam studi kedepanya yang terkait dengan riset ini dan menambah wawasan mengenai Pengaruh Angkatan Kerja Wanita dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini mampu menjadi salah satu referensi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat terkait dengan angkatan kerja wanita dan UMR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat